

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL
27 AYAT (2) UUD 1945 TENTANG HAK ATAS PEKERJAAN DAN
PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI WARGA NEGARA
(Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah (S.H.)

Oleh:

**ARIF WIFANDANI
NPM. 1721020331**

Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL
27 AYAT (2) UUD 1945 TENTANG HAK ATAS PEKERJAAN DAN
PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI WARGA NEGARA
(Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah (S.H.)

Oleh:

**Arif Wifandani
NPM. 1721020331**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Ahmad Sukandi, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Hak bagi warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak dasar yang patut dipenuhi oleh pemerintah sebagai jaminan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbentuknya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dimana hal tersebut secara jelas bahwa pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya. Namun dalam implementasi pasal ini tentu masih ada kekurangan yang sering dikeluhkan masyarakat, terkhusus yang dirasakan sebagian masyarakat menengah ke bawah yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam sudut pandang Maqashid Syariah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui Implementasi dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan dengan baik namun belum terealisasi secara maksimal berdasarkan tujuan dan fungsi dari Negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dimana keadilan sosial dan kesejahteraan umum belum dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh. Hal tersebut memang dipengaruhi beberapa faktor penghambat seperti pendidikan masyarakat, kondisi lingkungan (geografis), kondisi sosial politik, kondisi ekonomi masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan Maqashid Syariah memang implementasi pasal ini sudah selaras dengan tujuan dasar syariat Islam, namun belum berjalan secara maksimal untuk mencapai kemaslahatan umat yang di harapkan, karena pada hakikatnya Maqashid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia maupun di akhirat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Wifandani
NPM : 1721020331
Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 TENTANG HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI WARGA NEGARA (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....
Penulis,



Arif Wifandani
1721020331



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945
TENTANG HAK ATAS PEKERJAAN DAN
PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI WARGA
NEGARA (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**
Nama : Arif Wifandani
NPM : 1721020331
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Ahmad Sukandi, M.H.I.

NIP. 19711106199803200

NIP.

Ketua Jurusan,

Frenki M.Si.

NIP. 19803152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh Arif Wifandani, NPM 1721020331, Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakutas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



IR. H. Khairuddin, M.H.

NID 196210221993031002

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

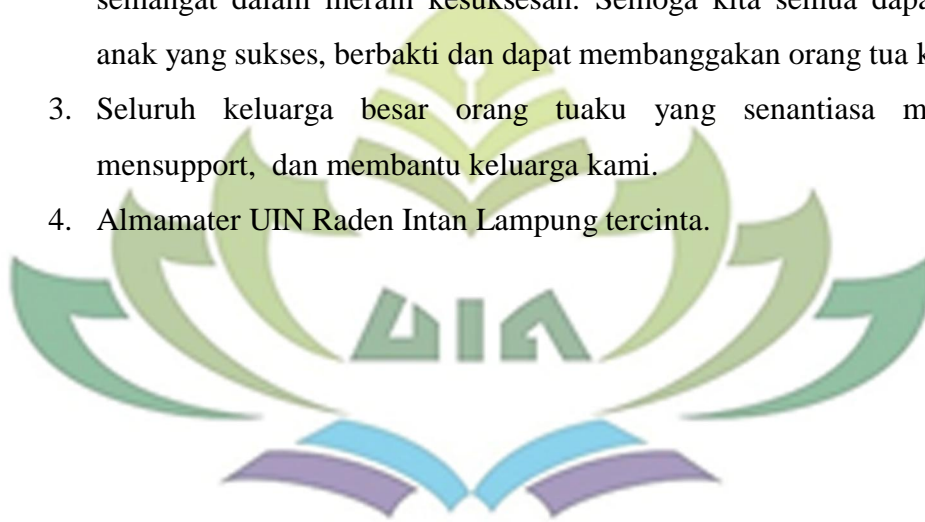
(Q.S. An-Nisa' [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Nursiman dan Ibu Nurjanah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku. Terkhusus pada ibuku tersayang yang perjuangannya sangat-sangat menjadi alasan untuk dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
2. Adik-adikku tersayang Nurul Azizah Aulia, Hananil Istikaroh, dan Khabil Nur Arsy yang slalu menjadi penyemangat dan alasan untuk tetap semangat dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang sukses, berbakti dan dapat membanggakan orang tua kita.
3. Seluruh keluarga besar orang tuaku yang senantiasa mendoakan, mensupport, dan membantu keluarga kami.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Arif Wifandani, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 23 Maret 1999, anak pertama dari empat (4) bersaudara buah cinta dari pasangan Bapak Nursiman dan Ibu Nurjanah. Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 01 Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Ponpes Daarul Khair Kotabumi Kabupaten Lampung Utara hanya selama 2 tahun dan melanjutkan hingga kelulusan di SMPN 01 Penumangan Lama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di MAN 01 Lampung Utara hingga lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,.....2021

Yang Membuat,

Arif Wifandani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan risalah Islam dimuka bumi ini dan mengharapakan syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyasah.
4. Bapak Hervin Yonki Pradikta, M.H.I. selaku sekretaris jurusan Siyasah.
5. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Pemerintah Kelurahan Kelapa Tujuh yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
9. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang di berikan kepada penulis, Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung,.....2021

Arif Wifandani

NPM. 1721020331



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Alasan Memilih Judul	9
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
G. Signifikansi Penelitian	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Maqashid Syariah.....	21
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	21
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah.....	23
3. Fungsi dan Tujuan Maqashid Syariah	27
4. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah	39
B. Konsep Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara.....	46
1. Pengertian Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.....	46
2. Pengertian Warga Negara.....	48
3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara Perspektif Hukum Positif.....	52
4. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara	60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. Sejarah Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara	60
2. Data Umum Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	60
3. Program Kerja Pemerintah Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	65
B. Gambaran Implementasi Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara	67
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara	76

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	81
B. Analisis Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara”** untuk memahami maksud dari judul tersebut dan menghindari kesalah pahaman, maka akan dipaparkan secara singkat mengenai istilah-istilah dan permasalahan dalam judul tersebut dengan berlandaskan teori serta sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹ Sedangkan menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari, ditafsir makna dan kaitannya.²

Maqashid Syariah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. Secara etimologi *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan kata *Syariah* berarti membuat syariat atau undang-undang, jalan yang lurus, menerangkan serta menyatakan. Sedangkan secara terminologi *Maqashid Syariah* yaitu maksud atau tujuan-tujuan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 51.

²Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 31.

disyariatkannya hukum dalam Islam.³ Dalam pengertian lain *Maqashid Syariah* adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariat diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum islam (yaitu Al-Qur'an dan sunnah) dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.⁴

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur adanya Hak Asasi Manusia berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam KBBI hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).⁵ Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghidupan yang layak, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang yang dapat hidup layak

³Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 62.

⁴Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3 (Bogor; STAI Nurul Iman, 2017), 5.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 807.

secara fisik dalam satu bulan⁶. Hal ini pun dapat dikatakan sejahtera, dimana semua kebutuhan terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun batin.

Warga negara dalam KBBI merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya. Yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut.⁷ Sedangkan menurut Graham Murdock definisi warga negara merupakan suatu hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan kehidupan kultural serta untuk dapat membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara yang mana akan mengurai terkait implementasi dari adanya Pasal tersebut bagi warga negara, apakah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah terpenuhi atau justru sebaliknya.

B. Latar Belakang Masalah

Hak setiap manusia untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh pekerjaan, serta bebas dari kemiskinan (*freedom from want*), “inilah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat

⁶Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan kebutuhan hidup layak.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1016.

dipisahkan daripada kodratnya dan karena itu bersifat suci”⁸. Adanya pengakuan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 tidaklah berarti pekerjaan pemerintah telah usai tentunya, hal inipun harus didukung dengan adanya program-program penunjang kesejahteraan masyarakat yang harus terealisasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, ini merupakan suatu amanah yang mana harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan diadakannya program-program kerja pemerintah yang menunjang pekerjaan masyarakat atau warga negaranya diharapkan agar dapat membantu penghidupan masyarakat yang lebih baik dan layak untuk dinikmati. Adanya pekerjaan inipun dapat mengurangi tingkat kejahatan dan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri dalam realisasi ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tidaklah suatu hal yang mudah, dapat kita perhatikan realita menunjukan di Indonesia keterbatasan lapangan pekerjaan cukup memprihatinkan, terkhusus untuk masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sulitnya tersedia lapangan pekerjaan itupun menyebabkan sebagian warga negara Indonesia sulit memperoleh pekerjaan yang kemudian tidak memperoleh penghidupan yang layak. Hampir disetiap adanya lowongan pekerjaan dari berbagai PT, bursa, atau Instansi tertentu bahkan Kementrian untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil, antrian

⁸Kuntjoro Purbopranto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 19.

panjang pendaftaran warga negara untuk dapat bekerja sudah tidak dapat dipungkiri. Tentunya hal inipun tidak sebanding dengan jumlah calon pegawai yang akan diterima dengan peserta yang mengikuti seleksi tes penerimaan pegawai tersebut, konsekuensi dari hal tersebut pun pada akhirnya membuat semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Masyarakat Kelurahan Kelapa Tujuh yang sebelumnya kebanyakan berprofesi sebagai petani dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas, setelah meningkatnya jumlah domisili penduduk dan bersaing dengan adanya pembangunan daerah, kini semakin mengecil untuk menjadi lahan bercocok tanam. Dengan hasil penjualan bercocok tanam yang kurang memadai dengan kebutuhan lainnya, seperti bibit, pupuk, dan biaya lainnya yang relatif tinggi membuat kebanyakan petani kecil pun dirugikan. Jalan keluar yang kebanyakan diambil agar memperoleh kehidupan yang layak ialah dengan mencari lowongan pekerjaan di kota-kota lain yang lebih besar dengan kemampuan dan pengalaman yang terbatas. Selain itu masih banyak bagi pekerja buruh harian di lingkungan Kelapa Tujuh yang sulit memperoleh pekerjaan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Faktor dan kondisi ekonomi di dalam negeri yang kurang memihak rakyat kecil bahkan mendorong beberapa warga di Kelurahan Kelapa Tujuh untuk menyeberang ke negara-negara tetangga untuk mencapai hidup layak sebagai manusia.

Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*⁹

⁹Pasal 28 huruf i ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹⁰

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, dimana segala bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Swt serta karunia dan nikmat-Nya senantiasa diberikan kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Tentunya hal ini menekankan bahwa Islam pun menjunjung tinggi terpenuhinya hak dan kesejahteraan bagi manusia, dari berbagai hukum dan aturan kehidupan yang ditentukan oleh syariat Islam tidaklah lain bertujuan agar terjaganya kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam Islam dikenal dengan adanya konsep *Maqashid Syariah*, dimana dalam konsep ini segala bentuk hukum atau aturan yang dibuat oleh *syara’* atas dasar rujukan atau tujuan tertentu yang mana agar terciptanya kemaslahatan umat. Menurut Abu Ishaq As-Syatibi dalam konsep *Maqashid Syariah*, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia salah satunya ialah harus terpenuhinya kebutuhan *Dharuriyat*. Kebutuhan *Dharuriyat* ialah suatu kebutuhan yang harus ada atau kita kenal dengan kebutuhan primer, menurut Syatibi ada lima kategori dalam konsep *Maqashid Syariah* yang dikenal dengan istilah *Adh-dharuriyat Al Khamsah* atau lima hal yang sangat penting, diantaranya adalah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.¹¹ Kelima hal itu merupakan masalah yang tentunya senantiasa harus dijaga oleh syariat walaupun dengan cara atau jalan yang

¹⁰Pasal 28 Huruf H (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 63.

berbeda-beda, sehingga syariat pun akan meletakkan dua sendi dasar yaitu mewujudkan hukum dan menjaga kesinambungan dari hukum tersebut.

Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga kesejahteraan umat manusia dimana agar terpenuhinya kebutuhan lahir dan batinnya, pada dasarnya menjaga lima perkara pokok untuk mewujudkannya, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Bahkan Allah Swt telah menjamin akan hak manusia untuk memperoleh rezeki yang cukup agar dapat hidup layak dan dapat terpenuhi segala kebutuhannya sebagaimana bunyi Q.S. Hud [11]: 6 sebagai berikut:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٦﴾

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Q.S.Hud [11]: 6)¹²

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa tidak satu pun makhluk bergerak dan bernyawa, merayap atau berjalan di muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Semua makhluk yang diciptakan diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezeki sesuai dengan fitrah kejadiannya. Dia mengetahui tempat kediamannya ketika hidup di dunia dan mengetahui pula tempat penyimpanannya setelah mati, semua itu telah tertulis dan diatur serapi-rapinya dalam kitab yang nyata, yaitu *Lauh Mahfuz*, perihal

¹²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009), 421.

perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah SWT secara menyeluruh dan sempurna.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat bagi diri manusia begitupun pada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh, pekerjaan tidaklah hanya sebagai sumber kehidupan untuk memenuhi hajat dari hidup manusia (sandang, pangan dan lainnya), pekerjaan pun dapat menjadi tolak ukur harkat dan derajat manusia di lingkungan masyarakat, keluarga bahkan negaranya. Dengan terpenuhinya hak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak itupun maka dapat tercapailah kesejahteraan sosial bagi warga negara, sebagaimana disampaikan dalam UU No. 11 tahun 2009 bahwa makna kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya¹³.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka masalah ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara.

¹³Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

C. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Bahwa dalam implementasi pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini yang terlihat masih banyak kelemahan dan kejanggalannya dalam pemenuhan hak atas pekerjaan maupun penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia oleh pemerintah. Selain itu, implementasi dari pasal tersebut apakah sudah sesuai dengan adanya *Maqashid Syariah* dalam agama Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Terkait dengan judul Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara menurut penulis layak untuk diteliti.
- b. Pembahasan judul skripsi ini dirasa cukup relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta tersedianya berbagai literatur yang dapat membantu selesainya penulisan dan penelitian skripsi ini.

D. Fokus Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan fokus penelitiannya pada objek yang diteliti. Apabila fokus dari penelitian telah ditentukan maka selanjutnya akan menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah sejauh mana peran pemerintah dalam memenuhi hak warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dari sudut pandang *Maqashid Syariah* di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam sudut pandang *Maqashid Syariah*?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui Implementasi dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam sudut pandang Maqashid Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan pemikiran, rujukan ataupun literature mengenai pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan pemerintah setempat dalam menjalankan kebijakannya terkait pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara.
- c. Secara metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tertentu yang mana selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian ilmiah lainnya, terkhusus dalam kajian tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara.

G. Signifikansi Penelitian

Kegunaan Penelitian:

1. Sebagai pengembangan wawasan mengenai pentingnya hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam sudut pandang Maqashid Syariah.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah selaku pelaksana kebijakan terkait Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara.
3. Merupakan suatu penambah wawasan ilmiah dan pemikiran politik tentang Implementasi suatu kebijakan dalam Undang-Undang.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran data-data.¹⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan induktif, karena dengan metode ini penulis rasa lebih relevan dalam pengolahan data. Dimana dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yang kemudian pembahasan dimulai dengan fakta atau data-data, konsep teori yang telah teruji kemudian

¹⁴Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 8.

disusun menjadi suatu generalisasi dan pada akhirnya ke hal yang khusus. Penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang mana akan memberikan gambaran mengenai Implementasi kebijakan Undang-Undang terkait pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mana langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁵ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis mengenai apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu. Selain penelitian yang terjun langsung kelapangan, dalam penelitian ini tentunya penulis juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yang mana sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa catatan, buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dilakukan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam sifat penelitian deskriptif, dimana data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa untuk membuat deskripsi secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya akan

¹⁵Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

¹⁶Ibid, 11.

dianalisa kembali secara kualitatif yang mana akan mendeskripsikan tentang bagaimana Analisis Maqashid Syariah terhadap Implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

3. Sumber Data

Data merupakan koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang mana diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*). Informan merupakan orang-orang yang memang faham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, selain itu informan yang dipilih haruslah yang dirasa cukup relevan dalam memberikan informasi agar dapat memperoleh data yang tepat dan akurat terkait penelitian tentang pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, serta *literature*

lainnya seperti Al-Qur'an, Hadits maupun data lain yang mana cukup relevan dalam melengkapi data primer dari penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diperoleh guna mengetahui gambaran umum obyek penelitian maupun keadaan sosial masyarakat. Dapat pula berupa penelusuran data secara online, yang mana diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data pendukung yang tentunya berhubungan dengan penelitian tersebut.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang mana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber terkait.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang mana dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula secara tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Namun dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, laporan notulen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap. Objek atau nilai

yang akan diteliti dalam suatu populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang kehidupannya di bawah standar layak dan masyarakat pengangguran atau masih mencari pekerjaan di atas usia 18 tahun yang terdata di Kantor Kelurahan Kelapa Tujuh berjumlah sekitar 350 orang, serta lembaga pemerintahan di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian terkecil dari suatu populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu dimana peneliti menentukan sendiri sample yang akan di ambil yang kemudian penentuan sampel dengan teknik pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel, jadi sampel tidak di ambil secara acak namun ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pemerintah Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara beserta unsur kesekretariatannya (2 orang).
- 2) Warga negara Indonesia atau masyarakat yang kehidupannya kurang layak dan masyarakat pengangguran/sedang mencari pekerjaan di atas usia 18 tahun yang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tinggal di

Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara berjumlah 62 orang.

6. Metode Analisis Data

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan telah diolah secara sistematis, maka selanjutnya akan dilakukan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara kualitatif. Dimana dilakukan upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap terkait keadaan hukum dan kebijakan yang berlaku di tempat tertentu, ataupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memenuhi rasa keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis, serta pada dasarnya untuk menemukan suatu kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masalah mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bukanlah suatu hal yang baru, adapun beberapa penelitian serupa yang mengangkat tentang hak atas pekerjaan maupun penghidupan yang layak bagi warga negara. Hal tersebut memang sampai saat ini masih menjadi bahasan yang cukup menarik untuk diteliti.

Adapun hasil dari skripsi Muhamad Ikhsan Khamil menjelaskan bahwa bekerja adalah hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup, dan pada hakikatnya setiap warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan

harus diberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materil maupun spiritual. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memberikan pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak.¹⁷

Kemudian hasil skripsi dari Ario Adrianto menjelaskan bahwa penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sepenuhnya belum dapat menjamin aspek perlindungan Hak Asasi Manusia terkhusus bagi para pekerja, hakikat keberadaan HAM merupakan upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Nilai-nilai perlindungan HAM yang terkandung dalam perspektif hukum Islam tentunya telah memenuhi segala ketentuan tentang perlindungan HAM secara universal. Hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dasar pekerja dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, yang pada hakikatnya berdasar pada konsep perlindungan HAM dalam perspektif hukum Islam.¹⁸

Kemudian hasil dari skripsi Achmad Sielmy menjelaskan bahwa salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pekerja di seluruh Indonesia dalam hal hubungan industrial yaitu penetapan upah minimum, yang mana pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup

¹⁷ Muhamad Ikhsan Khamil, *Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta:2018).

¹⁸ Ario Adrianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2017).

layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah “standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1(satu) bulan”.

Maksud hidup layak disini yaitu jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannyamampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara wajar selama 1(satu) bulan yang meliputi: sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (perumahan), pendidikan kesehatan, transportasi, rekreasi dan jaminan hari tua. Semua komponen itu harus ada agar seorang pekerja dapat dikategorikan sudah memenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam waktu 1 (satu) bulan.¹⁹

Kemudian hasil skripsi dari Dewi Indriani menjelaskan bahwa Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat bagi kebanyakan orang, dimana kehilangan pekerjaan berarti menurunkan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Masalah pengangguran dalam hal ini adalah keadaan tak terkendalinya pemenuhan hak atas kesejahteraan dan hak atas pekerjaan. Tingginya angka pengangguran dapat membawa bangsa berada pada kehancuran yang sulit dihindarkan, jika hal ini benar-benar terjadi maka negara tersebut tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. Ketiadaan pendapatan pun menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran

¹⁹Achmad Sielmy, *Penerapan Standar Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak oleh Dewan Pengupahan Kota Malang (Perspektif Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13 Tahun 2012 dan Maqashid Syariah)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:2016).

konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji memiliki spesifikasi tersendiri yang berbeda antar penelitian satu dengan yang lain. Karya tulis ini bisa saja menjadi bentuk kelanjutan dan dapat melengkapi karya-karya tulis yang sudah ada, perbedaan antar penulisan ini dengan penelitian terdahulu ialah didalam penelitian ini secara khusus menggunakan analisis hukum Islam yang dikaji lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*.



²⁰Dewi Indriani, *Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara lughawi (bahasa) *Maqashid Syariah* terdiri dari dua pokok kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti *المواضع تتحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Yang mana jalan

tersebut dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan²¹. Jadi *maqashid syariah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syari' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.²²

Teori *maqashid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syatibi (790 H/1388M), namun beliau kemudian mampu 'mengkomunikasikan' teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *maqashid syariah* hingga dijuluki dengan bapak *maqashid syariah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqat*.²³

Menurut Satria Efendi, *maqashid syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik

²¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 6.

²²Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi* (Riyadh: Ad-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, cet. 4, 1995), 18.

²³Raisuni, *Nazariyyah*. 17.

yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya ataupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²⁴

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukum-hukumnya.²⁵

Islam sebagai agama yang di rahmati oleh Allah SWT, yang dikenal dengan agama samawi memiliki kitab suci sebagai sumber utama ajarannya yang dikenal dengan al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu pokok ajaran Islam mengandung berbagai ajaran, yang mana para ulama membagi kandungan al-Quran tersebut kepada 3 (tiga) kelompok besar, Yaitu *aqidah*, *Khuluqiyyah*, dan *'amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, dan *amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan) dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia).²⁶

Al-Quran sebagai sumber ajaran pada dasarnya tidak memuat pengaturan yang terperinci terkait ibadah dan muamalah, dari sekian 6360

²⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 14.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 5.

J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London, University of London Press, 1976), 309.

²⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 73.

ayat hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan tentang aspek-aspek hukum. Hal tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar masalah hukum dalam Islam oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip yang ada dalam al-Quran. Bersudut pandang dari dasar atau prinsip tersebut, dituangkan pula oleh Nabi penjelasannya melalui hadis-hadisnya, kemudian berdasarkan dua sumber inilah aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama dimana diantaranya adalah tokoh al-Syatibi yang telah mencoba untuk dapat mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya terhadap *Maqashid Al-Syariah*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum islam agar terwujudnya kemaslahatan umat.

2. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Dalam Al- Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”(Q.S. Al-Anbiya' [21]:107)²⁷

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan

²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009)341.

pengamalan Islam yang baik dan benar. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia maupun di akhirat.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”(Q.S. Al-Baqarah [2]:185)²⁸

Tafsir dari ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa Allah SWT menghendaki keringanan dan kemudahan bagi hamba-Nya dalam ajaran-ajaran syariat-Nya, dan tidak menghendaki kesulitan atau keberatan bagi Hamba-Nya dalam menjalankannya.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S. An-Nahl [16]:90)²⁹

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, dimana pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan Allah memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil seperti memberi bantuan apapun yang mampu diberikan baik materi maupun nonmateri secara ikhlas, kepada kerabat, berupa keluarga dekat ataupun jauh, bahkan siapapun. Selain itu, Allah

²⁸Ibid., 27.

²⁹Ibid., 204.

melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti berzina dan membunuh. Melakukan kemungkaran yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat kebiasaan dan agama, serta melakukan permusuhan dengan sesama yang diakibatkan penzaliman dan penganiayaan. Melalui perintah dan larangan ini Allah memberikan ajaran dan tuntunan kepada manusia tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan kemungkaran agar dapat mengambil pelajaran yang berharga darinya.

Dalam Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling mendatangkan mudharat.” (H.R. Ibnu Majah)³⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, baik itu berupa perkataan atau perbuatan tanpa ada alasan yang benar, karena jelas bahwa ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan bagi diri pribadi dan orang lain.

الدِّينُ يُسْرَرُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

“Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah” (H.R. Bukhari)³¹

Dari hadits di atas Rasulullah menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, maksudnya ialah Islam lebih memudahkan dibandingkan

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terjemahan Khikmawati Cet.5 (Jakarta: Amzah, 2018), 13.

³¹ Ibid., 14.

dengan agama sebelumnya, dengan adanya Islam Allah mengangkat kesulitan dalam ajaran agama terdahulu. Dan disitu Nabi menyampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang disenangi Allah SWT dimana membawa kebenaran dan kemudahan bagi seluruh umatnya.

Kemudian dalam hadits berikut Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang asing yaitu mereka yang melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.”(H.R. Tirmidzi)

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW melawankan kata *mashlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan peninggalan disini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat muslim. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah ia yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan.³²

3. Fungsi dan Tujuan *Maqashid Syariah*

³²Ibid., 16-17.

Seorang *faqih* ataupun *mujtahid* harus mengetahui tujuan Allah SWT dalam setiap syariatnya (baik perintah dan larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT. Agar tidak terjadi hal yang tidak semestinya, misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan *dharuriyat* manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah.

Lembaga Fikih OKI (Organsasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid syariah* karena *maqashid syariah* memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bisa memahami *nash-nash* Al-Qur'an dan Al-Hadist beserta hukumnya secara komprehensif.
- b. Bisa men-*tarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar (*murraji'at*).
- c. Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.³³

Beberapa point poin di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan *maqashid syariah* itu sangatlah penting supaya produk-produk hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia. Misalnya dalam hal ketenagakerjaan khususnya produk-produk hukum itu harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia baik hajat mereka sebagai pekerja, pengusaha dan hal lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Menurut Imam Al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari

³³Oni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (JES: Jurnal Ekonomi Syariah 2, 2018), 46.

kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih sederhana, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelas baik secara bahasa maupun istilah *maqashid syariah* sangat erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Menurut Imam Al-Syatibi sesungguhnya *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tak lain hal tersebut untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan syariat tidak mempunyai suatu tujuan.³⁴ Di dalam *al-Muwafaqat*, kemaslahatan yang menjadi urgensi dari *maqashid syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang:

- a. *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan),
- b. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan hamba-Nya).

Untuk memperjelas konsep tersebut, maka Imam Al-Syatibi membaginya menjadi empat poin utama. *Pertama*, tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariah sebagai hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah payung/naungan hukum.³⁵

³⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 261.

³⁵Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al- Riyadh al- Haditsah, tth. 1997), 75.

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat *maqashid syariah*, aspek kedua, berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *taklif*, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapaun aspek keempat, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.³⁶

Dalam memproteksi *maṣlaḥah*, *maqashid syariah* menaungi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa dalam menjaga kemaslahatan umat manusia.³⁷ Kelima *maqashid* tersebut, yaitu:

- a. *Hifdzu al-Din* (memelihara agama);
- b. *Hifdzu al-Nafs* (memelihara jiwa);
- c. *Hifdzu al-Aql* (memelihara akal/pikiran);
- d. *Hifdzu al-Mal* (memelihara harta);
- e. *Hifdzu al-Nasab* (memelihara keturunan).

- a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama dan utama tentunya dalam hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup bagi

³⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 70.

³⁷Arif Wibowo, *Maqashid Asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, (Jurnal Ilmiah, Wonokromo. 2012), 7.

manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dan menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamina menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama yakni kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya masing-masing, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk dalam agama Islam. Dasar hak ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”³⁸

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa, meski memiliki kekuasaan yang sangatlah luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran-Nya, tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan, padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan dalam berdakwah, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik.

Kemudian ditegaskan pula dalam Surat Yunus [10] ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۙ ٩٩

³⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009), 52.

”Dan jikalau tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?.”³⁹

Dari ayat di atas, setelah Allah menjelaskan mengenai manfaat iman dari ayat sebelumnya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa beriman atau tidak beriman adalah pilihan bagi setiap manusia, karena jika Tuhan menghendaki tentulah beriman semua manusia di muka bumi ini. Namun apakah Nabi hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman sedangkan mereka menutup hati untuk menerima kebenaran.

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Perlindungan terhadap jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah penting. Apabila pemenuhan kebutuhan pokok hidup ini terabaikan maka akan membahayakan kelangsungan hidup bahkan dapat mengancam eksistensi jiwa setiap makhluk hidup.

Memelihara jiwa ini merupakan tujuan kedua dari adanya hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak setiap manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang adanya pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana dan prasarana yang dipergunakan manusia serta mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Bila kita ingat kembali tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi Muhammad Saw menuju kepadang Arafah dan di sana beliau

³⁹Ibid.,240.

berkhutbah, yang mana dalam point utamanya beliau menyampaikan bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak 14 abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan serta memperkokoh dasar dari hak-hak asasi manusia.⁴⁰

Hak paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak untuk hidup. Maka tidaklah mengherankan jika jiwa manusia dalam syariat Allah sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa [4] ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴¹

Dari ayat di atas, Allah menekankan bahwa larangan untuk membunuh diri sendiri ataupun orang lain, karena jelas bahwa Islam senantiasa menjaga keselamatan jiwa umatnya sebaga tanda bahwa Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya yang beriman.

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sumber hikmah ataupun pengetahuan bagi manusia, sinar hidayah, cahaya mata hati, maupun media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan adanya akal, ayat-ayat perintah dari

⁴⁰Ibid.,57.

⁴¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009),

Allah SWT dapat disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan dengan adanya akal pun manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Isra' [17] ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ٧٠ □

“Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”⁴²

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam, yaitu golongan manusia pada umumnya dengan tubuh yang bagus, kemampuan berfikir, kebebasan berkehendak dan ilmu pengetahuan. Adanya kendaraan seperti unta di daratan atau kapal di laut sebagai bentuk kekuasaan Allah, kemudian rizki yang baik diberikan sebagai kasih sayangnya berupa minuman atau makanan yang lezat rasanya.

Andai saja tanpa adanya akal, manusia tidak berhak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkat derajatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam malaikat yang luhur. Karena itulah akal menjadi poros pembebanan pada diri setiap manusia.

Dengan akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Penciptanya. Setiap kali manusia mengoperasikan akalnya, dimana disitu menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan.

⁴²Ibid., 309.

Lingkungan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa kasih sayang, cinta, dan ketenangan. Manusia pun akan merasakan rasa aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka selama hidup.

Akal seringkali disebut sebagai ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan perbuatan buruk dan mengerjakan kemungkaran. Dari sinilah Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akalnya, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau segala hal yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya kualitas dari akalnya.⁴³

d. Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, dimana dari harta selain terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dapat pula meningkatkan derajat pemiliknya dimata manusia lain. selain itu dengan memiliki harta yang melebihi kecukupan sehari-hari kita dapat memanfaatkan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT, baik dengan bersedekah ataupun berinfaq. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Kahfi [18] ayat 46:

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁴⁴

⁴³Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 56.

⁴⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009), 95.

Dari ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa harta kekayaan dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia, baik dan indah sifatnya seta bermanfaat bagi manusia tetapi dapat memperdaya dan tidak kekal. Namun amalan-amalan yang kekal lagi saleh yang dilakukan karena Allah dan sesuai tuntunan agama adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan yang dapat membawa kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti.

Manusia pastinya termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya di dunia dan demi menambah kenikmatan materi maupun religi, dia tidak boleh sampai berdiri sebagai pengahalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini tentunya dibatasi dengan tiga syarat, yakni harta yang dikumpulkannya harus dengan cara yang halal, kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan berkah, dan dari harta yang ia miliki harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat setempat dimana dia hidup. Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya tanpa ada dosa dan hak orang lain didalamnya.

Cara menghasilkan harta tersebut sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan cara usaha/ bekerja yang halal dan mewaris, maka seseorang pun tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nisa' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali

*dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁵

Ayat di atas secara ringkas menjelaskan bahwa larangan terhadap orang-orang beriman untuk tidak memakan atau memperoleh harta diantara sesama manusia dengan jalan kebathilan, yakni jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Boleh memperoleh harta kecuali diperoleh dengan cara yang benar dalam perdagangan atas dasar sama suka diantara manusia yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah seorang mukmin membunuh diri sendiri atau orang lain karena ingin mendapatkan harta, karena sungguh Allah Maha Penyayang kepada manusia dan hambahambanya yang beriman.

e. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Perlindungan terhadap keturunan tentunya dapat dilakukan dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan hidup dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan tersebut.

Nasab (keturunan) merupakan bagian dari fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang utama yang menghubungkan antar anggota keluarganya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab (keturunan) dari segala sesuatu hal yang menyebabkan pencampuran bahkan yang menghinakan kemuliaan dari nasab tersebut.⁴⁶

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009), 102.

⁴⁶Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, terjemahan Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 61-62.

Disyariatkannya menikah dalam Islam untuk menjaga keturunan, kemudian syariat juga menekankan untuk menjaga kemuliaan *Nasab* suatu Keluarga dengan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan seseorang terhadap perbuatan zina. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' [17] ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁴⁷

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan mengenai larangan untuk mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina, karena sungguh zina adalah perbuatan keji yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk karena dapat menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Kelima *maqashid* tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya, Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* membagi kepada 3 (tiga) tingkatan⁴⁸, yakni:

Pertama, kebutuhan *dharuriyat* (primer), adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi dari kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam lima sendi

⁴⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009), 309.

⁴⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terjemahan Khikmawati Cet.5 (Jakarta: Amzah, 2018), 38.

utama yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi-sendi ini tidak dapat terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia tersebut akan kacau, dan kemaslahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya dalam pemeliharaan kelima sendi utama tersebut berdasarkan skala prioritasnya, artinya sendi yang berada pada urutan pertama (agama) lebih diutamakan dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitupun seterusnya sampai sendi kelima.

Kedua, kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk dapat menghilangkan segala kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyat* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja dalam hidupnya.

Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* ialah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan-urusan manusia. Untuk maksud dan ketentuan tersebut, Islam sudah menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan *uqubat* (pidana).

Ketiga, kebutuhan *tahsiniyat*, adalah tindakan atau sifat-sifat yang mana pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama yang ada dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya ialah, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam terjadinya kekacauan dalam hidupnya, seperti apabila tidak terwujudnya aspek *dharuriyyat* dan

juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*. Namun, dengan ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁴⁹

4. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum kita kenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara/ pemerintah maupun tiap individu yang tidak boleh diabaikan satu sama lain. Oleh karena itu, negara/ pemerintah tidak hanya menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap individu yang ada di negara tersebut.

Sistem hak asasi dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama di dunia, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya terhadap Allah SWT⁵⁰. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujarat [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

⁴⁹Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Sumatera Utara, 2005), 14-15.

⁵⁰Eggi Sujana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Nuansa Madani, Jakarta, 2002), 76.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa.”⁵¹

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Allah jadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar ia saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antarsatu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Maha teliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.

Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang mana telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap manusi. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang mana menyeru untuk memelihara hak-hak setiap

⁵¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009), 516.

manusia dan hak-hak kemuliaannya, walaupun terhadap orang yang berbeda keyakinan/agama, sabda beliau:

“Barang siapa yang menzalimi seorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”(HR. Abu Dawud)⁵²

Hadits di atas jelas menjelaskan bahwa kita harus memelihara hak-hak setiap manusia, walaupun terhadap orang yang berbeda agama. Saling memuliakan satu sama lain dengan tidak mengganggu atau menyakiti mereka karena tentu akibat dari itu kita akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat.

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban bagi manusia. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw:

“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari pada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri.” (HR. Bukhari)

Di samping itupun, Islam juga menjamin hak bagi para pekerja, seperti disebutkan dalam Hadis Rasulullah Saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)⁵³

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita harus bersegera menunaikan hak seorang pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

⁵²Muhamad Ikhsan Khamil, *Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2018), 19.

⁵³Eggi Sujana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Nuansa Madani, Jakarta, 2002), 43.

Adapun konsepsi dalam Islam tentang hak untuk memperoleh pekerjaan ialah:

Pertama, bekerja dan berusaha dalam Islam merupakan hukum yang ditetapkan wajib, maka dari itu setiap orang muslim dituntut untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memakmurkan hidupnya. Sebaliknya Syariat Islam tidak menyukai orang yang pemalas dalam bekerja (pengangguran). Islam juga memandang rendah kepada orang-orang yang mengemis, yang mana mereka menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan cara meminta-minta tanpa adanya usaha yang sebagaimana telah di ajarkan dalam syariat Islam serta di contohkan oleh nabi Muhammad Saw.

Kedua, Islam tentunya menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki dan kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan bagi setiap Manusia, dan mereka bebas memilih pekerjaan yang hendak dikerjakannya, sepanjang pekerjaan itu halal dan dalam jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Lalu yang *Ketiga*, Islam menetapkan bahwa tiap-tiap pekerjaan itu adalah sebagian dari bentuk ibadah.⁵⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, bekerja merupakan bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja dalam pekerjaannya bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang sangat besar baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Demikian pun, dengan bekerja individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan

⁵⁴Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah, Universitas Sumatera Utara. 2005), 32-33.

berbuat baik dengan tetangga serta saudara muslimnya. Semua bentuk yang diberkati oleh agama ini hanya dapat terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja.⁵⁵

Substansi *maqashid syariah* adalah kemaslahatan, kemaslahatan dalam *taklif* tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: *pertama*, dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam artian kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan. Pada dasarnya hak asasi manusia dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dloruriyat al-khomsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-'ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) *hifdzu al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan *hifdzu al-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan).⁵⁶

Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih manusiawi dimana disitu dapat terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup yang layak baik lahir maupun batin agar terwujudnya kemaslahatan dari adanya ketentuan syariat Islam, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

⁵⁵Eggi Sujana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Nuansa Madani, Jakarta, 2002), 56.

⁵⁶Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*. (Jurnal Ilmiah, Universitas Islam Sultan Agung. 2009), 19-20.

Dalam sebuah hadist Rasulullah Saw Bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا
حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan dunia untuk dirinya.” (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad, al-Qudha’i dalam Musnad Syihâb, al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Îmân dan al-Humaidi dalam Musnad al-Humaidi).

Dalam hadits di atas, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa keamanan, kesehatan dan pangan, merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga dapat tercapai kecukupan untuk menjalani kehidupan dunia. hal ini menunjukkan bahwa ketiganya merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi individu dan umat ini. Beliau menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan bagi seseorang membuat dirinya seperti memperoleh dunia secara keseluruhan, hal itu sebagai kiasan dari pentingnya kebutuhan-kebutuhan ini.⁵⁷

Syariat Islam telah mewajibkan terealisasinya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Islam pun memberikan serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat dengan mekanisme langsung dan tak langsung oleh laki-laki, keluarga, masyarakat maupun negara.

⁵⁷Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah, Universitas Sumatera Utara. 2005), 39.

Pemerintah memang sepatutnya harus melindungi, menaungi dan memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya sebagaimana dijelaskan di atas, ketika dari hak untuk memperoleh pekerjaan bagi warga negaranya telah terpenuhi maka dari situ akan terbuka jalan kemaslahatan yang ada di masyarakat dari setiap individu, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu sandang, pangan maupun papan. Bahkan pendidikan pun haruslah sangat diperhatikan bagi warga negaranya agar terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang siap untuk terjun di dunia profesi/pekerjaan, kemudian ia dapat mencapai kehidupan yang layak di dalam lingkungannya.

B. Konsep Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara

1. Pengertian Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Hak atas pekerjaan dan hidup layak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan setiap orang yang bernaung di suatu Negara dengan menjalankan kewajibannya ia berhak untuk memperoleh hal tersebut, dan pemerintah pun harus memenuhinya. Hak atas pekerjaan dapat dikatakan sebuah konsep yang mengungkapkan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam segala kegiatan yang bersifat produktif dan berpenghasilan, dan mereka tidak boleh di larang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang.

Dapat kita katakan bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia, hal ini dikarenakan bekerja adalah hal yang sudah melekat pada tubuh manusia. Bekerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau

difikirkan lepas dari tubuh manusia. Kemudian bekerja merupakan perwujudan diri manusia, dengan bekerja manusia dapat merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Dengan bekerja seseorang menjadi manusia yang seutuhnya, melalui bekerja manusia dapat menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Dikatakan hak untuk bekerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena bekerja berkaitan dengan hak atas hidup. Hak atas pekerjaan ini telah tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵⁸

Hak atas pekerjaan seseorang dapat terpenuhi apabila seseorang tersebut dapat bekerja dengan upah/ gaji yang sesuai, dan dengan gaji tersebut diharapkan ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang harus diterima dan dituntut oleh seorang pekerja sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Dikatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah, artinya ialah setiap pekerja berhak untuk dibayar, bahkan setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah, hakikatnya ia juga berhak memperoleh upah yang adil yaitu upah yang dikatakan sebanding dengan tenaga yang telah ia disumbangkannya. Bahwa pada prinsipnya tidaklah boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam hal pemberian upah kepada seluruh pekerja, dengan kata lain harus berlaku prinsip upah yang sama bagi pekerjaan yang sama.⁵⁹

⁵⁸Kuntjoro Purbopronto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 75.

⁵⁹Nikolas Wicaksono Prakoso Putro, *Tinjauan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian*

Seorang warga negara dikatakan dapat penghidupan yang layak dalam lingkungannya bukan berarti ia yang hanya mempunyai harta atau kekayaan yang cukup dalam hidupnya. Selain daripada itu seseorang dapat dikatakan memperoleh kehidupan yang layak apabila dalam lingkungan kehidupannya diperlakukan sama dengan individu lainnya tanpa ada perbedaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban diluar dari tanggung jawabnya.

Hak untuk diproses hukum secara sah, dimana seseorang tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan apabila ternyata ia tidak bersalah maka ia berhak diberi kesempatan untuk membela dirinya. Hak untuk diperlukan secara sama, dimana di dalamnya tidak boleh ada diskriminasi dalam lingkungannya entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan sebagainya, baik dalam sikap dan perlakuan. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama dan sebagainya adalah perlakuan yang tidaklah adil.⁶⁰ Oleh sebab itu seorang warga negara dikatakan dapat hidup layak adalah ia yang dalam kebutuhan sandang, pangan, maupun papan dalam hidupnya telah terpenuhi secara adil dan kemudian di dalam lingkungannya dalam bermasyarakat diperlakukan sama satu dengan yang lainnya tanpa ada penyimpangan hukum.

2. Pengertian Warga Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran

Kebutuhan Hidup Layak guna Mewujudkan Upah layak, (Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Univertas Negeri Surakarta, 2015), 69.

⁶⁰Enrico Didie Krisnawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja atas Kerja Lembur* (Skripsi, Universitas Airlangga: 2011), 55.

dan sebagainya, dimana mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di Negara itu.⁶¹

Menurut Wolhoff warga negara merupakan sejumlah manusia yang terikat dengan manusia lainnya sehingga membentuk keanggotaan. Dimana keanggotaan ini didasarkan atas kesatuan Bahasa, kehidupan sosial budaya, serta kesadaran nasionalnya.⁶²

Begitupun dengan pengertian warga negara Indonesia, Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 12 Tahun 2006 ayat (1) dan (2) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, orang yang berhak menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang berasal dari bangsa Indonesia asli atau orang yang berasal dari bangsa lain, tetapi ia telah disahkan menjadi warga negara Indonesia melalui undang-undang. Sebagai bukti seseorang telah menjadi warga negara Indonesia terdapat sebuah kartu identitas yang bernama Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP ini memiliki nomor identifikasi unik (NIK) yang terdaftar di kantor-kantor pemerintah Daerah. Selain daripada itu, warga negara Indonesia juga berhak memiliki paspor, yang mana berfungsi sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tatanan hukum internasional ketika ia hendak berangkat keluar Negara.

Dari beberapa pengertian di atas terkait warga negara maka munculah suatu istilah yang biasa kita dengar dengan sebutan kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan

⁶¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1016.

⁶²Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Pradigma, Yogyakarta. 2012), 118.

hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
- b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.⁶³

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu:

⁶³Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pradigma, 2012), 120.

- a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
- f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

1. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.⁶⁴

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara, hal tersebut bertujuan untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas pula yakni asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara Perspektif Hukum Positif

Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya tidaklah lain untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kualitas serta perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana amanat dari adanya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (2) UUD

⁶⁴Undang-Undang no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1945, karena sepatutnya hak-hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga hak-hak di bidang sosial dan ekonomi seperti halnya hak atas pekerjaan bagi warga Negara.⁶⁵

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) juga telah mengatur hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) ” *Everyone has the rights to work, to free choice of employment, a just a favourable conditions of work and to protection against unemployment* dan ayat (2) *Everyone without any discrimination, has the right equal pay for equal work*”. Adanya jaminan negara terhadap hak asasi manusia untuk bekerja dan memperoleh imbalan/upah yang layak merupakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mana bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak.⁶⁶

Zaman modern seiring waktu berkembang pesat dengan munculnya revolusi industri 4.0, yang mana hal ini menyebabkan sebagian pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia akan hilang karena adanya era digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi/kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Dengan kata lain sebagian pekerjaan yang dulunya menggunakan tenaga kerja manusia akan digantikan oleh mesin seperti yang terjadi pada industri perbankan sejauh ini, dimana para karyawan bank harap-harap cemas karena tengah menghadapi hal yang menakutkan dengan adanya revolusi industri 4.0.⁶⁷

Negara pada dasarnya mengemban tiga tingkat tanggung jawab yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya karena ketiganya saling terikat. Prinsip

⁶⁵Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, (UB Press, Malang, 2012), 23.

⁶⁶Jimly Asshidiqie, *Pergumulan Peran Pemerintahan dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (UI Press, Jakarta, 1996), 117.

⁶⁷Hendra Suwardana, *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*, (Jurnal JATI UNIK, Vol. 1, No. 2, April 2018), 103-104.

konstitusi yang paling utama menyangkut Pekerjaan adalah Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Rumusan Pasal 27 ayat (2) adalah rumusan yang ada sejak awal mula diberlakukannya UUD 1945 sebagai hukum dasar di negara Indonesia. Menurut Ismail Suny sebagaimana dikutip dalam Agusmidah, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut merupakan *a paper constitution* atau *a semantic constitution*. Dengan mengakui hak warga negaranya untuk mendapat pekerjaan maka sebenarnya Indonesia telah bertekad dan memutuskan untuk melenyapkan pengangguran dengan mewajibkan pemerintah untuk memberantas pengangguran dan harus mengusahakan supaya setiap warga negara bisa mendapat pekerjaan dengan nafkah yang layak untuk hidup. Lebih lanjut, hak atas pekerjaan tersebut, termuat juga dalam bab XA tentang hak asasi manusia.⁶⁸

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat (*in alienable rights*) pada diri manusia dari sejak dalam kandungan, sehingga negara wajib untuk memberikan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak tersebut. Salah satu hak asasi manusia yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 28 A yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Pasal 28 C ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat*

⁶⁸Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, (Sofmedia, Jakarta, 2011), 208.

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat”.⁶⁹

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, setiap orang dijamin oleh negara untuk mempertahankan hidupnya dengan cara apapun sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hak hidup merupakan hak fundamental seseorang (*first order intraction*) untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) kehidupan setiap orang, maka harus dilindungi dan dihormati. Hal itupun tentu berlaku bagi semua golongan masyarakat termasuk warga negara penyandang disabilitas, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “*Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau swasta tanpa diskriminasi*”. Negara mengemban tanggung jawab menjamin warga negara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanya dengan salah satu caranya yaitu melalui bekerja.⁷⁰

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan kerja dalam mencari lapangan kerja karena merupakan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*”⁷¹

⁶⁹Muhtaj, Majda El. *Dimensi- Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), 114.

⁷⁰Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, (Sofmedia, Jakarta, 2011), 133.

⁷¹Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: New Elmatera, 2011), 21.

Hak untuk bekerja (*right to work*) memberikan pemahaman bahwa pemerintah/negara harus berupaya semaksimal mungkin membebaskan rakyatnya dari ketiadaan akan pekerjaan. Karena pekerjaan merupakan dasar bagi setiap orang mendapatkan jaminan kesejahteraan (*welfare*) bagi diri dan keluarganya dengan mendapatkan imbalan (upah) atas apa yang telah dikerjakannya. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah harus dilihat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kondisi kerja yang layak bagi kemanusiaan, karena merupakan kewajiban yang harus diwujudkan oleh Negara.⁷²

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur, yang mana meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Asuransi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Hak-hak atas standar hidup layak telah diakui sebagai HAM. dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyatakan “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Serta Ayat 3 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”.

Selain itu, jelas dalam prinsip-prinsip deklarasi HAM yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu tidak dibagi, diwakilkan, apalagi

⁷²Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, (Sofmedia, Jakarta, 2011)178-179.

dirampas. Hak-hak konstitutif berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Hak-hak itu berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perumahan, sandang, pangan dan rasa aman. Hak konstitutif aspiratif ini mustahil dapat dipenuhi jika hak warga yang berpendapat dan dilibatkan dalam proses pembangunan tidak dipenuhi karena hak ini merupakan kewajiban Negara kepada warganya.⁷³

4. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Sesungguhnya negara menjamin setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya syarat. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.⁷⁴

Pasal ini berbicara tentang perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupannya, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan. Isi dan kandungan pasal ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara secara layak sebagai salah satu tanggung jawab mutlak negara terhadap warga negaranya.

Kata ” berhak atas” berbeda makna dengan kata berhak mendapatkan atau berhak. Kata “berhak” atau kata “berhak mendapatkan” menunjukkan pengertian bahwa seseorang memiliki hak tetapi dirinya masih harus mencari

⁷³Theresia Ngutra, *pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di kota makassar*, (Jurnal Ilmiah, Universitas Negeri Makassar, 2017), 5.

⁷⁴Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara.

untuk mendapatkan haknya, sedangkan kata “berhak atas” bermakna seseorang berhak memiliki haknya yang mana sudah disediakan/sudah ada.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tertuang kata “berhak atas pekerjaan” menunjukkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan tanpa perlu mencarinya dengan penghasilan/upah yang layak, karena Pekerjaan ini harus sudah disediakan atau disiapkan oleh Negara, dalam hal ini merupakan tugas pegawai/pekerja pemerintahan.

Bagi setiap warga negara usia produktif yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan siap bekerja semestinya berhak mendapatkan Pekerjaan sesuai bidang Studinya. Pekerjaan itupun disesuaikan dengan angkatan kerja yang ada, sehingga tak ada lagi seseorang yang telah lulus sekolah, kemudian ia mencari pekerjaan apapun hanya sekedar agar dapat bertahan hidup karena ini adalah hak warga negara yang telah jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan kata “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” kalimat tersebut bermakna tentang sarana pendukung penghidupan yang layak bagi standar kehidupan manusia berupa sandang, pangan dan papan. Seperti tersedianya rumah dan tempat tinggal bagi mereka yang telah siap dan telah memiliki keluarga sendiri dan sarana penghidupan lainnya di lingkungan tempat ia tinggal sesuai standar kehidupan Manusia, bukan layaknya binatang. Sehingga makna Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah setiap warga negara dijamin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak serta sarana penghidupan sebagai tempat tinggal dan kebutuhan lainnya juga yang layak bagi kemanusiaan oleh negara.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya dengan penghasilan yang layak dan sarana penghidupan yang layak untuk ukuran kemanusiaan atau dengan kata lain setiap warga Negara Indonesia harus ada dalam batas hidup sejahtera.

Sedangkan pengertian warga negara sendiri memiliki 2 (dua) unsur sesuai pasal 26 (1) UUD 1945 yaitu : *“Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai warga negara”*.⁷⁵

Artinya bahwa warga negara Indonesia terdiri dari orang Indonesia Asli dan orang bangsa lain yang mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia yang kemudian disahkan atas dasar Undang-Undang. Maka, orang asing yang telah diterima bersedia berbakti pada bangsa dan negara Indonesia, maka dia berhak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian maka makna pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara secara tegas melindungi hak warga negaranya, baik orang Indonesia asli maupun orang asing yang telah diterima kewarganegaraannya untuk dapat hidup layak sebagai manusia di Negara Indonesia.

⁷⁵Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) Tentang Warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, cet. 4, 1995.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Achmad Sielmy, *Penerapan Standar Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak oleh Dewan Pengupahan Kota Malang (Perspektif Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13 Tahun 2012 dan Maqashid Syariah)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2016).
- Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, (Sofmedia, Jakarta, 2011).
- Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imām asy-Syaṭibi* (Riyadh: Ad-Dar al Raisuni, Nazariyyah di kota makassar, (Jurnal Ilmiah, Universitas Negeri Makassar, 2017).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terjemahan Khikmawati Cet.5 (Jakarta: Amzah, 2018).
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3 (Bogor; STAI Nurul Iman, 2017).
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-Haditsah, tth. 1997).
- Arif Wibowo, *Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*. (Jurnal Ilmiah, Wonokromo. 2012).
- Ario Adrianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2017).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, (UB Press, Malang, 2012).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).

- Dewi Indriani, *Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019).
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Eggi Sujana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Nuansa Madani, Jakarta, 2002).
- Enrico Didie Krisnawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja atas Kerja Lembur*, (Skripsi, Universitas Airlangga: 2011).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*. (Jurnal Ilmiah, Universitas Islam Sultan Agung, 2009).
- Hendra Suwardana, *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*, (Jurnal JATI UNIK, Vol. 1, No. 2, April 2018).
- J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London, University of London Press, 1976).
- Jimly Asshidiqie, *Pergumulan Peran Pemerintahan dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (UI Press, Jakarta, 1996).
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Pradigma, Yogyakarta. 2012).
- Kuntjoro Purbopranto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997).
- Muhamad Ikhsan Khamil, *Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2018).
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Studi of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, terjemahan Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996).
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi- Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013).
- Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Nikolas Wicaksono Prakoso Putro, *Tinjauan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak guna*

Mewujudkan Upah layak, (Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2015).

Oni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (JES: Jurnal Ekonomi Syariah 2, 2018).

Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: New Elmatera, 2011).

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Theresia Ngutra, *pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin*, (Jurnal Ilmiah, Jakarta, 2014).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah, Universitas Sumatera Utara. 2005).

Sejarah Lampung Utara, <https://lampungutarakab.go.id>

